

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK PALSU DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Tahun 2014-2016)**



OLEH :

DIANA SITAMMU

B 111 09 351

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU DI
KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Tahun 2014-2016)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Bagian Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

DIANA SITAMMU

B 111 09 351

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2014 - 2016)

Disusun dan diajukan oleh

DIANA SITAMMU

B111 09 351

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 23 Agustus 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : DIANA SITAMMU
Nomor Pokok : B 111 09 351
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIK PALSU DI KOTA
MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2014 - 2016)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DIANA SITAMMU
Nomor Pokok : B11109351
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar(Studi Kasus Tahun 2014-2016)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2016



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 003

ABSTRAK

DIANA SITAMMU (B11109351). Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016) **dibimbing oleh Muhadar dan Haeranah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap peredaran kosmetik palsu di wilayah kota Makassar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada dua cara yaitu penelitian normatif dengan telaah pustaka dengan empirik dengan melakukan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor penyebab peredaran kosmetik palsu, faktor utama adalah faktor ekonomi, atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal, kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota Makassar khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah, bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang gampang untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu. 2) Upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu, Upaya pre-emptif dengan mengacu kepada Renstra BPOM di Makassar Tahun 2015-2019 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM untuk 5 (lima) tahun ke depan. Upaya preventif dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen untuk membedakan dan mengetahui dampak dari penggunaan kosmetik palsu, Upaya represif dengan menjerat para pelaku pemalsuan kosmetik sesuai dengan peraturan yang ada. Saran penulis : Diharapkan agar semua *stake holder* agar lebih antisipatif dalam melakukan sosialisasi terkait dengan peredaran dan bahaya penggunaan kosmetik palsu, diharapkan agar pihak BPOM dan kepolisian baik skop Polrestabes kota Makassar atau Polda Sulselbar agar lebih meningkatkan kerjasama dalam upaya operasi penanggulangan peredaran kosmetik palsu mulai dari pengawasan barang palsu yang masuk sampai penyalahgunaan barang industri yang diracik menjadi kosmetik palsu, Selanjutnya Agar pelaku pemalsuan kosmetik agar dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga segala halangan yang Penulis hadapi dalam merampungkan skripsi ini dapat Penulis hadapi dengan berbesar hati dan tetap berusaha sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang ditentukan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis. Sehingga Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak,

Penulis berharap dapat menambah pengetahuan Penulis dalam bidang ilmu pengetahuan yang Penulis geluti.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada orang tua tercinta **Semuel Sitammu, Rita Tandiongan**, dan **Orpa Gatung**, mertua **Y.G Sudi** dan **Ester Pasang** yang selalu menyirami Penulis dengan kasih sayangnya dan tiada henti-hentinya mendoakan Penulis demi kesuksesan Penulis sebagai anak bungsunya. Serta kepada suami tersayang **Anthonius Pasudi** dan sibuah hati **Leonardo Massolo'** yang menjadi penyemangat hidup dan pemberi motivasi bagi Penulis, dan yang selalu mendoakan yang terbaik buat Penulis. Juga kepada saudara-saudara Penulis **Sunarti Sitammu, Rendy Steven Sitammu, Noli Samante, Winda Sitammu, Adriani Jeni Tandi, Gerson Lallo, Sherly, Selvi, Jupry**, dan **Albert**, ipar-ipar Penulis **Lewi Massolo'**, **Herlina, Lenny, Luther, Selfi, Marce Pasudi, Andi Pasudi, Andarias Pasudi, Yuliana**, dan **Yuliani**, yang selalu mendoakan dan memberi suntikan semangat bagi Penulis.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan dan kerja sama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan I; **Dr. Syamsuddin Mukhtar, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II; dan **Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III;
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Haeranah, S.H.,M.H** selaku **Pembimbing II** yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. **Prof. Dr. H.M. Said Karim , S.H.,M.H.,M.Si, Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H,** dan **Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H** selaku tim **Penguji** yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi Penulis ini lebih baik;
6. **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan **Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H** selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana;
7. **Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H** selaku Penasehat Akademik Penulis;
8. Kepala UPT Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya yang bersedia

membantu/memfasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi penulis;

9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya;
11. Sahabatku **Rosari** yang selalu setia menemani, membantu, dan selalu siap untuk direpotkan oleh Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Teman-teman **Doktrin Angkatan 2009**;
13. Segenap Keluarga Besar **PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen)** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Teman-teman **KKN UNHAS Gel.90 Kabupaten Barru, Kec. Pujananting**, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu;
15. Keluarga besar Desa Bacu Bacu (Posko Bacu Bacu) Ibu **Rosma** sekeluarga, Kepala Desa **Pak Ansar**, Kepala Dusun Batu Lappa, Kepala Dusun Ammerung, dan Kepala Dusun Ampiri.
16. Keluarga Besar dari pihak Papa, Mama dan Mertua
17. Sepupu-sepupu Penulis **Veby Kanan Marendeng, Vernianthy Kanan Marendeng, Sintice Kanan Marendeng, Priskila Kanan Marendeng,**

Erni Sitammu, Erda Sitammu, Atto Sitammu, Hana, dan Yusuf yang selalu memberi semangat kepada Penulis;

18. Keluarga pihak Papa **Daniel Sitammu** dan **Elisabet Tandi Sipatu**, Serta **Herlin Sitammu** dan **Simon Kanan Marendeng** yang selalu menyemangati Penulis agar tetap sabar dan pantang menyerah;

19. Keluarga pihak Mama **Kakek** dan **Nenek**, tante **Mershy Tandiongan**, om **Andi Tandiongan**, om **Amos Tandiongan**, tante **Mama Dinda**, tante **Mama Marto**, dan om **Jony Tandiongan**;

20. **Pdt. Anthonius Payung** yang selalu mendoakan proses penyelesaian studi Penulis;

21. Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga Penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini. Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Tuhan yang membalasnya, Amin.

Akhir kata, Penulis berharap kiranya Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Terima kasih.

Makassar, Agustus 2016

Penulis

DIANA SITAMMU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi	13
B. Kejahatan	15
1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahan	15
2. Teori kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris	17
3. Teori kejahatan dari faktor Sosio-Kultural.....	18
C. Kejahatan Terhadap Merek	20

1. Kejahatan Pelanggaran Merek	20
2. Domain Kejahatan dalam perdagangan Barang Palsu.	26
3. Kosmetik Palsu	33
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Tinjauan Umum Terhadap Lokasi Penelitian	44
B. Faktor Penyebab Peredaran Kosmetik Palsu	47
C. Upaya Penanggulangan Peredaran Kosmetik Palsu	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang begitu pesat menciptakan manusia dengan budaya konsumerisme. Secara alamiah manusia selalu berusaha mengikuti gaya hidup terkini, akan tetapi belum tentu kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya didukung oleh kemampuan secara ekonomi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang memicu permasalahan hukum dengan maksud mengikuti tren berbagai cara dilakukan salah satunya adalah dengan penggunaan barang palsu, Hal ini merupakan tindak pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pada Hak Merek. Maraknya peredaran barang palsu menjadi salah satu penyebab masyarakat terbiasa dalam menggunakan barang palsu. Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, maka penggunaan barang palsu merupakan suatu kejahatan.

Keinginan seseorang untuk memiliki barang-barang yang *update* dan bermerek dengan harga murah telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi barang-barang palsu yang begitu mirip dengan aslinya akan tetapi dapat dimiliki dengan harga murah. Memang ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur tentang tindak pidana terkait pelanggaran merek. Akan tetapi,

keberadaan payung hukum yang berisi sanksi yang tegas tentang larangan peredaran barang palsu tidak membuat oknum-oknum jera dalam mengedarkan barang palsu.

Di sisi lain, globalisasi menghapus batas-batas negara sebagai dampak kemajuan teknologi informasi, sarana transportasi maupun tuntutan pergaulan internasional. Sementara globalisasi menyebabkan konsekuensi logis dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi adalah penerapan perdagangan bebas dalam bentuk perdagangan barang dan jasa antar negara tanpa intervensi pemerintah. Dalam praktiknya, berbagai bentuk intervensi telah dikenakan. Dalam tingkatan tertentu suatu intervensi dapat dibenarkan terutama untuk kepentingan umum.

Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan, salah satunya ialah meningkatkan investasi modal asing dalam menanamkan modal di Indonesia dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis HKI). HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota *gradual* dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasikan dan direproduksi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional. (Adrian Sutedi, 2009:5)

Berkaitan dengan HKI, Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja Indonesia juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset kekayaan intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) pada tahun 2015 merilis hasil studi yang menyimpulkan peredaran produk berpotensi merugikan negara hingga Rp.65,1 triliun. Sekretaris Jenderal MIAP Justisari P. Kusumah mengatakan kerugian itu meningkat dibandingkan hasil survei MIAP (2010) yang memperkirakan kerugian perekonomian terkait Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp.43,2 triliun. (<http://www.solopos.com/2015/02/25/hasil-survei-miap-peredaran-produk-palsu-berpotensi-rugikan-negara-rp651-triliun-580110>). Diakses pada tanggal 12 April 2016 Pukul 13:00).

Merek seyogianya berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; dan jaminan atas mutu barangnya. Dalam era perdagangan bebas seperti

sekarang ini, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen mendapatkan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek (Muhammad Firmansyah, 2008:6).

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek, baik yang berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan, baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mempunyai perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara. Ketentuan terkait perlindungan merek terkenal secara internasional diatur dalam *The Paris Convention For the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan juga dalam *TRIPS Agreement* (Perjanjian TRIPS).

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal berlaku bagi seluruh anggota Konvensi Paris dan penandatanganan Perjanjian TRIPS (*The World Trade's Organization's TRIPS Agreement*) termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui

Keppres Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan *Convention Establishing The World Protection Intellectual Property Organization* dan Keppres Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Of Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia).

Maraknya peredaran barang palsu di pasar kian meresahkan banyak pihak, selain merugikan pemerintah dari sektor pemungutan pajak, investor atau pemegang merek, keberadaan barang palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja dan konsumen sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung dapat membedakan merek terkenal dengan merek terkenal palsu, tetapi mereka mengabaikannya demi menunjang gaya hidup. Keadaan seperti inilah yang perlu diperhatikan pemerintah agar pemegang merek terkenal atau investor mendapat jaminan perlindungan hukum terhadap berkembangnya merek-merek terkenal palsu dalam skala besar. Tindakan pemanfaatan merek akan mengurangi kepercayaan pihak asing atau investor terhadap jaminan perlindungan merek yang mereka miliki, akibatnya muncul ketidakpercayaan dunia internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam hal hubungan dagang. Selain itu, kerugian juga dialami dari sisi pekerja. Secara nasional industri di dalam negeri berpotensi mengalami potensi kehilangan Rp.3 triliun per tahun, yang seharusnya dapat digunakan untuk membayar upah

tenaga kerja atau buruh yang bekerja pada produsen barang asli akibat maraknya peredaran barang palsu. Apabila dikalkulasikan, dari Rp.3 triliun tersebut, potensi kehilangan upah ini terutama mengancam buruh yang bekerja di sektor industri pakaian dan barang dari kulit sebesar Rp.2,32 triliun, industri makanan dan minuman sebesar Rp.620,2 miliar, industri farmasi dan kosmetika sebesar Rp.268,4 miliar serta industri software dan tinta printer sebesar Rp.186,3 miliar (<http://ipnews.acaciapat.com/>, diakses 13 April 2016 Pukul 20:10).

Khusus untuk daerah kota Makassar perdagangan barang-barang palsu yang dijual bebas memiliki banyak peminat. Apalagi posisi Makassar dengan pelabuhan internasionalnya dan dengan rendahnya pengawasan menjadi pintu masuk barang palsu atau ilegal yang bisa beredar ke konsumen. Banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan barang yang menggunakan merek yang palsu tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Banyaknya peminat dari barang-barang palsu ini disebabkan oleh harganya yang relatif murah dibandingkan dengan harga barang yang aslinya, apalagi dikalangan masyarakat ada dikenal barang kualitas super yang menurut mereka barang yang palsu tersebut kualitasnya hampir sama dengan yang asli dan harganya tentu saja terjangkau dan menguntungkan bagi para produsen.

Memanfaatkan merek terkenal produsen yang ilegal tidak perlu mengurus Nomor Pendaftaran ke Dirjen HKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date* karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta di lapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil bergaya mutakhir. Banyak barang-barang palsu yang beredar selain tas, seperti baju, celana, jaket dan berbagai barang elektronik lainnya sangat mudah didapat dan 7 (tujuh) ditemukan di kota-kota besar, khususnya kota Makassar. Peredarannya pun meluas mulai dari pedagang kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah.

Penelusuran penulis menemukan fakta bahwa terdapat 7 (tujuh) komoditas yang produknya banyak dipalsukan, yakni *software*, kosmetika, farmasi atau obat-obatan, pakaian, barang dari kulit, makanan dan minuman sampai tinta *printer*. Dari beberapa kasus di kota Makassar sebagai contoh pemalsuan pakaian dengan merek “Kiddrock” pernah bergulir kasusnya di pengadilan tinggi makassar. Selain itu keberadaan

online shop juga ikut mendukung peredaran barang palsu, seperti Iphone palsu yang dipromosikan melalui akun media sosial.

Berdasarkan uraian fakta empiris tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan HKI khususnya merek yang terjadi di kota Makassar, walaupun sudah ada regulasi yang memproteksi peredaran barang palsu, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak penyimpangan–penyimpangan yang terus terjadi. Pada penulisan ini penulis akan fokus pada pemalsuan kosmetik yang merupakan salah satu komoditi yang rentan untuk dipalsukan. Atas dasar itu penulis mengangkat suatu penelitian dengan judul : ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)”***

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik palsu di kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya peredaran kosmetik palsu di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan solusi terkait kejahatan peredaran kosmetik palsu.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk memahami perkembangan keilmuan hukum, baik secara praktik maupun secara teoritis.
3. Menjadi salah satu rujukan bagi para ahli hukum, akademisi, praktisi, maupun mahasiswa hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan (A.S. Alam, 2010:1).

Kriminologi itu pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis, dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu (Bambang Poernomo, 1994:40).

1. Pengertian Kriminologi

Adapun pengertian kriminologi menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut (A.S. Alam, 2010:1 -2) :

Edwin H.Sutherland :

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

W.A.Bonger :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

J.Constant :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

WME. Noach :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:11) :

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Soejono D. (R. Susilo, 1985;3) dalam bukunya yang berjudul “Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan”, mengartikan bahwa :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

S. Seelig (R. Susilo, 1985:3) merumuskan bahwa :
Kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya
gejala-gejala badaniah dan rohaniyah dari kejahatan.

W. Sauer (R. Susilo, 1985 :3) :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat jahat dari pribadi seseorang dan bangsa-bangsa berbudaya. Oleh karena itu, obyek penyelidikan kriminologi adalah pertama, kriminalitas di dalam kehidupan orang perorangan, dan kedua, kriminalitas di dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.

Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:12) :

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:12) :

Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Wolgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime and Delinquency (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:12) memberikan definisi

kriminologi sebagai berikut :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi, objek studi kriminologi meliputi :

- Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- Pelaku kejahatan;
- Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:9), ruang lingkup kriminologis dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan, adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Kriminologi Murni, meliputi :

a. Antropologi Kriminil;

lalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang tanda-tanda orang jahat dalam tubuhnya, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminil;

lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil;

lalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari jiwanya.

d. Psikopatologi Kriminil dan Neuropatologi Kriminil;

lalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penology;

lalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan, meliputi :

a. Higieni Kriminil;

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Misalnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil;

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi, tidak semata-mata dengan penjatuan sanksi.

c. Kriminalistik (*Police Scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusungan kejahatan.

Menurut Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani 2009;11), kriminologi mencakup tiga cabang ilmu utama, yaitu :

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

B. KEJAHATAN

1. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan juga semakin berkembang, pola pikir (*mindset*) masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, terkait

pengaruh perkembangan pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut :

2. Teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (Biologi Kriminal)

Selain teori yang dikemukakan oleh Lambrosso bahwa seorang pelaku kejahatan bisa dikenali melalui ciri-ciri fisiknya, usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar :

- a) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- b) Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan.
- c) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

Teori mengenai kejahatan ini lebih bervariasi, dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat, yakni sebagai berikut (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987:53-54) :

- a) Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri.

- b) Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
- c) Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsi.
- d) Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- e) Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu.

3. Teori-teori kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi kriminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan dan walaupun ada, maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikologi.

4. Teori-teori kejahatan dari faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)

Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari :

- a) Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi

lainnya, utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut (Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, 1987:62).

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dimana hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conficous consumption*" (Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1989:94).

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya "*The mental tester theory*" berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya (Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, 1987:54).

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger (R. Soesilo, 1985:28), dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab

kejahatan. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. KEJAHATAN TERHADAP HAK MEREK

1. Kejahatan Pelanggaran Hak Merek

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing), demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati. (<https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>). Diakses pada 23 Mei 2016 Pukul 20:00).

Pelanggaran di bidang hak merek dapat dijadikan sebagai perbuatan yang dilarang atau sebagai tindak pidana. Penentuan sebagai

tindak pidana ini berarti merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalam kebijakan kriminal ini mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dapat dengan sarana non-hukum pidana. Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ini berarti norma-norma di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ditegakkan dengan hukum pidana yang bersanksi negatif, khususnya dalam menanggulangi pelanggaran hak merek sebagai kejahatan di bidang ekonomi.

Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Didahului oleh peranan para Gilda yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerjaan anggota Gilda sejawat, yang akhirnya menimbulkan temuan atau cara mudah memasarkan barang (Harsono Adisumarto, 1990:44-45). Di Inggris, merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) sebagai suatu sistem tanda resmi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong yang terus

dipakai secara efektif bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya (Muhammad Djumhana & Djubaedillah, 1993:117).

Menurut undang-undang merek bahwa merek yang sudah didaftarkan, maka kepada pemilik merek diberi hak atas merek dan mendapat perlindungan dari perbuatan orang lain mengambil, mengutip, memperbanyak atau menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya tanpa izin pemegang hak merek, atau yang dilarang undang-undang merek atau melanggar perjanjian.

Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dinyatakan bahwa :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Abdulkadir mengemukakan bahwa dilarang undang-undang artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu untuk dilakukan karena :

1. merugikan pemegang hak merek, misalnya melakukan pemalsuan merek orang lain kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat;
2. merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan merek yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;

3. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual barang atau jasa yang bermerek porno.

Sedangkan melanggar perjanjian menurut Abdulkadir (2001:220) artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak, misalnya dalam perjanjian pembatasan penggunaan merek hanya pada barang atau jasa tertentu saja bukan menggunakan merek keseluruhannya. Hal ini jelas merugikan pemegang hak merek yang asli.

Dirdjosisworo mengemukakan bahwa bentuk kejahatan terhadap merek dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, memperbanyak dan mengumumkan merek orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin pemegang hak merek yang bertentangan dengan Undang-Undang Merek Tahun 2001, atau melanggar ketentuan Undang-Undang Merek Tahun 2001, misalnya (Dirdjosisworo : 2000) :

1. Memalsukan atau mengutip merek orang lain dimasukkan ke dalam usaha dagang sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
2. Menyalahgunakan izin pemegang hak merek untuk tujuan komersial, seperti memalsukan merek barang dan/atau jasa lalu diperjualbelikan dengan memerlukan keuntungan;
3. Melampaui jumlah yang diizinkan dalam perjanjian.

Menurut Abdulkadir (2001:220) kejahatan pelanggaran hak merek barang dan/atau jasa dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Meniru sebagian hak merek orang lain dan dimasukkan kedalam barang dagangnya seolah-olah itu kepunyaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan (*plagiarism*);
2. Mengambil kepunyaan merek orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan atau perjualbelikan merek aslinya tanpa mengubah bentuk, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perbuatan ini disebut pembajakan (*piracy*).

Menurut Saidin (2003:357), kejahatan hak merek di bidang barang atau jasa diantaranya adalah berbentuk pembajakan merek dan pemalsuan merek. Pembajakan diartikan sebagai pengambilan hasil merek orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemegang merek. Pemalsuan diartikan sebagai tindakan pengambilan merek orang lain yang sudah ada kemudian dipalsukan merek tersebut sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal. Munculnya istilah

pembajakan dan pemalsuan merek tidak terlepas dari kaitannya dengan pengertian hak atas merek itu sendiri, yaitu hak eksklusif bagi pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, apabila ada orang lain yang telah melakukan perbuatan telah mengambil merek orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya maka perbuatan itu disebut pembajakan dan pemalsuan (Muhamad Djumhana, 2006:84).

Pembajakan merek dapat juga terjadi melalui teknologi komputer/internet, yaitu *domain name* atau nama domain adalah penamaan atau suatu situs sebagai identitasnya yang unik di internet. Nama domain hanya ada satu dalam jaringan internet dunia dan nama domain itu sendiri dapat berupa nama, susunan huruf, kata, atau angka. Nama domain sebagai suatu yang dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan nama domain lain dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Pembajakan nama domain melalui internet yang dilakukan oleh orang dengan tanpa izin pemegang hak atas merek nama domain.

Kemudian termasuk pelanggaran hak merek barang atau jasa apabila melanggar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa :

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Artinya bahwa tanpa persetujuan pemilik atau ahli warisnya tidak bisa mengadakan perubahan terhadap tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna yang dilakukan oleh pemegang hak merek.

2. Domain Kejahatan dalam Perdagangan Barang-barang Palsu.

Pada masa sekarang ini, istilah “KW” muncul untuk menunjukkan barang-barang tiruan atau palsu dari produk bermerek, termasuk tas. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sendiri hanya dikenal istilah barang palsu untuk menyebut barang-barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Selain dapat menjerat pihak-pihak yang beritikad buruk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang palsu, Undang-undang merek juga dapat dipergunakan untuk menjerat pihak-pihak yang memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran.

Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek juga digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, selain untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli (Wiratmo Dianggorro, 1997:34).

Apabila suatu produk tidak mempunyai merek, maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak baik) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang (Insan Budi Maulana, 1997:60).

Penjual yang menggunakan merek hasil dari pelanggaran (barang palsu) biasanya menggunakan merek terkenal dalam memasarkan barang dagangannya untuk menarik minat konsumen. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh untung dengan mudah tanpa memikirkan dampak buruk yang dialami oleh si pemegang hak merek yang asli. Pedagang mengaku dengan menggunakan merek terkenal mereka dapat dengan mudah memasarkan barang dagangannya ke konsumen. Pada

hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena sikap konsumtif masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label minded*), apalagi kalau itu merupakan merek terkenal. Akan tetapi, karena daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan tidak cukup mampu untuk membeli barang-barang asli yang memiliki kisaran harga cukup tinggi. Oleh karena itu, timbullah niat pelaku usaha (pedagang) untuk menyediakan barang-barang KW/imitasi/palsu dengan menggunakan merek terkenal.

Dalam merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Secara umum, hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai “hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya”. Dengan demikian, hak eksklusif memuat dua hal, yaitu pertama, menggunakan sendiri merek tersebut, dan kedua, memberi ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut.

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang

atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa :

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dengan ditentukan pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada

pemegang hak merek terdaftar yang „beritikad baik“ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif di luar pengadilan.

Pemalsuan merek merupakan delik aduan dan secara tegas pula dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Undang-Undang Merek menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain sehingga terkait delik aduan pun penyidikan kepolisian dapat dihentikan hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan.

Dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan di mata hukum pun polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak. Dalam sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, yakni sistem *first to file*, pelanggaran merek hanya terjadi apabila ada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beritikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan

sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. Tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek karena dalam sistem *first to file*, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik pendaftaran merek. Pelapor harus mampu menunjukkan sertifikat merek atau alas hak lainnya yang sah pada saat melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana merek. Selain harus mampu menunjukkan bukti kepemilikan merek yang sah, si pelapor harus mampu menunjukkan kepada kepolisian perbedaan-perbedaan antara barang asli dan barang palsu secara jelas. Hal ini tentu saja untuk menghindari penegak hukum melakukan kekeliruan dalam menangkap dan memproses pidana para pelaku pelanggaran merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek sebagai pelanggaran. Delik pelanggaran secara jelas disebut dalam Pasal 94 yang menegaskan bahwa, “barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan atau Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”. Pasal 90 menegaskan bahwa, “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan”. Pasal

91 menegaskan bahwa, "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan".

Pasal 92 ayat (1) menegaskan bahwa, "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar "

Pasal 92 ayat (2) menegaskan bahwa, "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar".

Pasal 92 ayat (3) menegaskan bahwa, "terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)".

Pasal 93 menegaskan bahwa, "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut"

Selain delik pelanggaran, selebihnya adalah delik kejahatan. Hal ini berarti bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana. Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana Pasal 90 menegaskan bahwa, "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)". Pasal 91 menegaskan bahwa, "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)". Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95, tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan delik aduan.

3. Kosmetik Palsu

Kosmetik berasal dari bahasa Inggris *Cosmetic* yang artinya "alat kecantikan wanita". Dalam bahasa Arab modern diistilahkan dengan *Alatujtajmil*, atau sarana mempercantik diri. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kosmetik adalah sesuatu berhubungan dengan kecantikan (tentang corak kulit); *n* obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir). Definisi lebih rincinya menurut badan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Departemen Kesehatan, kosmetika adalah panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis/kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik.

Kosmetik saat ini telah menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Dan sekarang semakin terasa bahwa kebutuhan adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen menuntut industri kosmetik untuk semakin terpicu mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukannya dari kosmetik itu sendiri namun juga kepraktisannya di dalam penggunaannya (Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007).

Menurut BPOM dan Depkes, ada sejumlah bahan berbahaya yang sering disalahgunakan ditambahkan pada kosmetika, yaitu : Bukti terbaru dipaparkan BPOM, menurut penjelasan kepala BPOM, Dr. Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App. Sc, pihaknya menemukan ada banyak merek kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang digunakan untuk

kosmetik. Bahan berbahaya tersebut yaitu: Merkury (Hg), Hidroquinon, Zat warna Rhodamin B dan Merah K3. Temuan ini hasil pengawasan BPOM yang dilakukan dari tahun 2012 hingga kini.

Dari peredaran bahan kosmetik palsu di pasaran tentu merupakan sebuah hal yang berbahaya dan sangat merugikan bagi para konsumen. Dampak merugikan dari penggunaan kosmetik palsu tentu merupakan suatu hal yang perlu dihindari sejak dini. Bahaya bagi kesehatan pengguna sangat serius mulai dari alergi, kanker sampai kegagalan jantung. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko kesehatan. Secara tidak sadar kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuh. Zat kimia yang terkandung dalam pewarna kuku tersebut menyerap melalui pori-pori kuku sehingga masuk ke dalam tubuh. Kerusakan pada saluran pencernaan juga dapat diakibatkan oleh zat kimia di dalam kosmetik palsu, ini dari hasil penelitan BPOM akan bahaya dari kandungan kosmetik palsu, apalagi pada kosmetik-kosmetik yang mengandung merkury.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, selain itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2007).

Menurut Barda Nawai Arif, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*". (Barda Nawawi Arief, 2007)

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa yang berpendapat bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif). (Baharuddin Lopa , 2001).

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa (2001:16-17) itu meliputi :

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah dimulai atau kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah, baik di pihak pelaku yang sama ataupun pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman, baik yang mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, hal itu tergantung pada bentuk hukumannya. Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain untuk berbuat kejahatan.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan

memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi harus diperhatikan pula atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Hal itu menjadi tugas dari setiap kita karena kita adalah bagian dari masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) di wilayah hukum Kota Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam skripsi ini adalah di Kepolisian Resor Wilayah Makassar. Sampel dalam skripsi ini adalah bagian reseksi kriminal di Kepolisian Resor Wilayah Makassar.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan

memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Library Research*), Observasi (*Observation*), dan Wawancara (*Interview*).

1. Studi Pustaka (*Library Research*) merupakan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis bahas.
2. Observasi (*Observation*), pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengamatan tidak terlibat (*nonparticipant observation*), dimana dalam menggunakan metode ini pengamat tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati. Oleh sebab itu, kehadiran pengamat di tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai mempengaruhi kelompok tersebut, sehingga data yang diperoleh bukan merupakan

keadaan yang sesungguhnya. Demi menghindari hal tersebut, maka peneliti akan memperhatikan dua hal. Pertama, peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan sosial budaya dari kelompok yang diamati. Kedua, ketika berada di tengah-tengah kelompok tersebut, harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kelompok tersebut

3. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Lokasi Penelitian

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara antara 119°18'38" sampai 119°32'31" Bujur Timur dan antara 5°30'30" sampai 5°14'49" Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km². Luas laut dihitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 km², dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0° sampai 9°. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai, yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan

bersamaan dengan naiknya air pasang. Secara umum topografi kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

- Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah, dekat dengan pesisir pantai.
- Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang, Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, lazim dikenal sebagai kota dengan ciri "*Waterfront City*", di dalamnya mengalir beberapa sungai yang kesemuanya bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Jeneberang, Pampang). Sungai Jeneberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara ke bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m/detik). Sedangkan sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m/detik di musim kemarau.

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke arah Timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan industri di Makassar. Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak dimanfaatkan, sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan terhadap sungai-sungai ini dimulai dari rencana bagaimana menjadikan sungai-sungai ini sebagai daerah objek wisata hingga pada rencana bagaimana menjadikannya sebagai jalur alternative baru bagi transportasi kota. Hanya saja, sejalan dengan perkembangannya saat ini dinamika pengembangan wilayah dengan konsentrasi pembangunan seakan terus berlomba di atas lahan kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak sedikit lahan yang terpakai saat ini menjadi lain dalam peruntukannya, hanya karena lahan yang dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya pada satu ruang tertentu saja.

Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar antara 25° C

sampai 33° C. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari hujan bekisar 144 hari per tahun. Untuk daerah-daerah yang mendekati pegunungan, yaitu daerah sebelah timur, hujan basah cenderung sampai pada bulan Mei, sedangkan pada daerah pantai, umumnya sampai bulan April.

Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia baik dari jumlah penduduk yakni peringkat V (2 juta jiwa) ataupun dari segi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%, bahkan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Makassar memicu gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi. Berdasarkan data di atas, Makassar menjadi salah satu target utama para pelaku usaha yang menyebabkan banyaknya perusahaan dan tingginya persaingan di Makassar.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar

Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia timur yang menjadikannya sebagai kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang padat.

Aktivitas ekonomi hampir di semua bidang mulai dari pertanian, peternakan, industri barang dan jasa, sampai bidang ekstraktif. Khususnya di bidang industri, aktivitas ekonomi itupun dikategorikan mulai dari rumah tangga sampai industri besar seperti perusahaan yang menggunakan modal yang besar. Pada fokus kajian, penulis secara khusus akan menganalisis industri pelayanan barang, spesifiknya adalah kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu komoditas yang banyak digunakan oleh konsumen. Segmentasi dari pengguna kosmetik mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Bahkan kosmetik sudah bisa dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan primer.

Tingkat kebutuhan terhadap penggunaan kosmetik ini kemudian berakibat kepada rentannya barang tersebut untuk dipalsukan. Mulai dari sabun mandi, cream, lotion, lipstick, bedak dan beragam jenis kosmetik lainnya. Tentu hal ini mesti diuraikan faktor-faktor penyebab sehingga kosmetik menjadi barang yang rentan untuk dipalsukan. Berkaitan dengan peredaran obat-obatan dan kosmetik palsu mudah sekali didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah yang banyak terjadi. Tanpa ada perhatian terhadap fenomena peredaran kosmetik palsu, maka akan berakibat terhadap semakin bertambahnya kejahatan peredaran kosmetik palsu. Asumsi dasarnya adalah bahwa hal ini terjadi karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak industri kecil atau industri rumah

tangga yang memproduksi dan ingin mengeruk keuntungan dari konsumen tanpa mempertimbangkan efeknya. Masalah ini sulit diselesaikan karena sudah lama terjadi dan cukup luas penyebarannya, sehingga bisa disebut sebagai kejahatan terselubung (*Hidden Crime*). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) khususnya bidang pemeriksaan dan penyidikan baru akan bertindak apabila ada pengaduan dari masyarakat.

Di bawah ini penulis akan melampirkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan persentase kenaikan kosmetik yang memenuhi standar dari tahun 2012-2014.

Tabel I

Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar

Persentase Kenaikan Kosmetik yang Memenuhi Standar			
Tahun	2012	2013	2014
Kosmetik Yang Memenuhi Standar	99.09	98.91	98.91
Target kenaikan kosmetik yang memenuhi standar	25	25	25
Realisasi kenaikan kosmetik yang memenuhi standar	4.05	3.87	3.87
% Capaian Indikator	16.2	15.48	15.48

Sumber : BPOM Makassar

Dari data nampak bahwa terjadi penurunan persentase kosmetik yang memenuhi standar pada tahun 2012 dari tahun 2010 sebesar 2.12%. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan kenaikan kosmetik yang memenuhi syarat hingga mencapai 99.09%, tahun 2013 terjadi penurunan tidak bermakna sebesar 98.91% demikian pula pada tahun 2014. Persentase

pencapaian kosmetik yang memenuhi standar dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan sebesar 3.87% dari tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa kosmetik yang terdapat pada beberapa sarana yang diperiksa menunjukkan peningkatan pemenuhan standar kosmetik yang aman bagi masyarakat. Persentase capaian yang diperoleh sebesar 15.48% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 25%.

Dari data tersebut secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa kosmetik yang ada di masyarakat umumnya aman untuk digunakan, hanya saja tidak bisa disimpulkan lebih awal sebab terdapat fluktuasi angka atau persentase penggunaan kosmetik yang memenuhi standar. Pertimbangan lain juga tidak menutup kemungkinan belum menjadi bagian dari perhitungan. Selain itu tanda registrasi pada obat dan kosmetik mudah dipalsukan sehingga banyak masyarakat yang tertipu. Kemungkinan itu bisa terjadi, akan tetapi produk-produk itu akan diperiksa oleh Balai Besar POM (BBPOM) apakah produk tersebut terdaftar di dokumen registrasi. Apabila setelah dicek nama obat itu tidak terdaftar, maka obat itu akan ditarik dari pasaran.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, dari penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka di bawah ini penulis akan melampirkan kosmetik yang dianggap berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara umum memastikan 70 (tujuh puluh) produk kosmetika di pasaran mengandung zat kimia berbahaya, 2 (dua) di antaranya merupakan merek produk ternama Ponds dan Olay.

Dari hasil penelusuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 70 (tujuh puluh) produk itu mengandung zat berbahaya seperti Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, zat warna Merah K.3 (C1 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (C1 12075). Berikut 70 (tujuh puluh) merek produk berbahaya yang akan ditarik peredarannya :

18 (delapan belas) merek produk kosmetika rias wajah dan rias mata berbahaya;

1. Cassandra Superior Quality Lipstick No. 1-10
2. Cassandra Superior Lip Gloss No. 1-12
3. GLD Garland Lipstick No. 9
4. Marie Anne Beauty Shadow No. 4, 5, 6, 8
5. Marie Anne Blush On No. 3
6. Sutsyu Eye Shadow & Blusher 01
7. Sutsyu 18 Colors Eye Shadow 01
8. Sutsyu Lipstick Colors Fix No. 1, 3, 4, 6
9. Sutsyu Lipstick Colors Fix No. 5
10. Asnew Blush On
11. Cameo Makes You Beauty Detox 4 in 1 Complete Make Up
12. Marimar Eye Shadow & Powder Cake
13. Natural Belle Colors Fix Lipstick No. 313
14. Olay 4 in 1 Complete Make Up
15. Pond's Detox Complete Beauty Care Make Up Kit

16. Pond's Detox Eye Shadow Blusher & Lip Gloss, Powder No. 1-2
17. Pond's Detox Complete Beauty Care Eye Shadow Two Way Cake
18. Pond's Detox Complete Beauty Care

7 (tujuh) merek produk kosmetika pewarna rambut berbahaya;

1. Casandra Hair Dye Pink C-14
2. Casandra Hair Dye Maroon C-17
3. Casandra 3D Profesional Hair Colors Cream Hair Dye Wine Red C-
4. Salsa Hair Colorant Pink Colors (S-018)
5. Salsa Hair Colorant Cherry Red (S-019)
6. Casandra Hair Dye Maroon C-17
7. Casandra 3D Profesional Hair Colors Cream Hair Dye Grape Red

44 (empat puluh empat) merek produk kosmetika perawatan kulit berbahaya;

1. Caronne Beauty Day Cream
2. Caronne Whitening Cream (Day Care)
3. Caronne Whitening Cream (Night Care)
4. CR Lien Hua Bunga Teratai Day Cream
5. CR Lien Hua Bunga Teratai Night Cream
6. CR Racikan Ling Zhi Day.Cream
7. CR Racikan Ling Zhi Night Cream With Vit.E

8. CR Day Cream With Vit.E
9. CR UV Whitening Night Cream
10. CR UV Whitening Day Cream
11. DR's Secret 3 Skinlight
12. DR's Secret 4 Skinrecon
13. Dr. Fredi Setyawan Extra Whitening Cream
14. Dr. Fredi Setyawan Whitening Cream II
15. Fruity Vitamin C
16. Plentiful Night Cream
17. QL Papaya Peeling Gel
18. QL Day.Cream
19. QM Natural Vitamin C & E
20. Scholar Night Cream
21. Top Gel MCA Extra Pearl Cream Plus
22. Top Gel MCA Extra Cream
23. Top Gel TG-3 Extra Cream
24. Topsyne Aloe Beauty Cream TS-858
25. Topsyne Beauty Cream TS-3
26. Topsyne Beauty Cream TS-802
27. Topsyne Beneficial Skin Cream TS-868
28. Topsyne Vit C & Placenta
29. Topsyne Day Cream & Night Cream

30. Topsyne Vit E & C TS-819
31. Topsyne Extra Beauty TS-821
32. Elastiderm Decolletage Chest and Neck
33. Obagi Nu-Derm Blender Skin Lightener & Blending Cream
34. Obagi Nu-Derm Blender Skin Lightener with sunscreen
35. Obagi Nu-Derm Toleran Anti Pruritic Lotion
36. Obagi C RX System Clarifying Serum
37. Obagi C RX C Therapy
38. Olay Total White
39. Olay Krim Pemutih
40. Pond's Age Miracle Day and Night Cream
41. Qianyan
42. Quint's Yen
43. Skin Enhacer
44. Temulawak Nutrition Cream.

1 (satu) merek produk mandi;

1. Jinzu Strawberry White & Beauty Soap

Pada 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 2015 korban penggunaan kosmetik palsu terus meningkat karena kurangnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang dan pengetahuan masyarakat mengenai produk

berbahaya ini. Meskipun bidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM selalu melakukan penyitaan terhadap kosmetik palsu yang beredar, masyarakat masih saja tertarik dengan harga yang murah dan efek yang cepat terlihat dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait dengan kasus peredaran kosmetik palsu yang diekspos ke media, ada beberapa kasus peredaran kosmetik yang menjadi sorotan, baik oleh media lokal maupun media nasional. Kasus tersebut menjadi sorotan dengan pertimbangan bahwa hampir semua kota besar yang ada di Indonesia juga terdapat kasus yang sama. Di bawah ini penulis akan memaparkan data terkait dengan kasus peredaran kosmetik palsu di kota Makassar.

Selain itu penulis juga melakukan penelusuran khususnya di pasar-pasar tradisional di kota Makassar. Walaupun pemalsuan kosmetik ini termasuk dalam kategori *hidden crime* atau kejahatan terselubung akan tetapi penulis menemukan beberapa kasus yang terkait dengan peredaran kosmetik palsu. Di Pasar Daya Lama, penulis menemukan beberapa kosmetik yang merupakan kosmetik palsu, hanya saja penjual tidak memberikan informasi dari mana asal-usul kosmetik tersebut, apakah diracik sendiri atau dibeli dari orang lain. Hal itu membuat penulis berkesimpulan bahwa peredaran kosmetik palsu bukan lagi suatu hal yang baru akan tetapi sudah lama hanya saja perlu perhatian khusus faktor-faktor penyebab

munculnya kosmetik palsu tersebut. Di bawah ini penulis melampirkan kasus kosmetik palsu yang terdata di kota Makassar :

Tabel II
Jumlah Kasus Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar antara
Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Kasus	Tahap Kasus	
		Terlapor	diproses
2014	8 Kasus	4 Kasus	3 Kasus
2015	13 Kasus	6 Kasus	6 Kasus
Total Kasus	21 Kasus	10 Kasus	9 Kasus

Sumber : Polrestabes Kota Makassar

Dari tabel tersebut dapat diamati bagaimana peningkatan kasus peredaran kosmetik palsu selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peredaran kosmetik palsu tersebut terjadi di beberapa lokasi yang berbeda. Dari 3 (tiga) kasus yang penulis dapatkan merupakan salah satu kasus peredaran kosmetik dengan skala yang besar. Kasus pertama, ribuan kosmetik oplosan dan berbahaya berhasil disita dalam sidak yang

dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Makassar bersama dengan Polda Sulselbar di salah satu toko terbesar di Makassar milik H. Rusli. Dalam pengeledahan di toko milik H. Rusli yang terletak di Jalan Karuwisi, Maccini Raya Makassar, Sulsel, ditemukan kurang lebih 100 (seratus) jenis item yang tidak jelas dan semuanya diracik tanpa dasar kewenangan dan keahlian. Kasus ini terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015.

Menurut Muh. Guntur, Kepala BPOM Makassar mengatakan kandungan campuran kosmetik yang diduga bahan berbahaya tersebut dikemas di toko milik H. Rusli dalam kemasan kecil berukuran 100 milligram dan dipasarkan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Penggrebekannya dilakukan setelah mendapat laporan konsumen yang merasa dirugikan sehingga dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Alhasil ditemukan ribuan kosmetik oplosan, baik yang sudah dikemas maupun masih berbentuk bahan baku.

“Pelanggarannya jelas, mereka mendistribusikan kosmetik oplosan berbahaya tersebut tanpa izin serta memproduksi tanpa ada keahlian dan keterampilan khusus”, ujarnya.

“Mengenai pelaku”, lanjut Muh. Guntur, “akan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini

kepolisian. Sementara terhadap barang bukti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membawa barang sitaan tersebut ke kantor BBPOM untuk diteliti lebih lanjut. Saat ini pelaku masih dalam terperiksa belum dilakukan tindakan hukum, namun jelas ini pelanggaran. Untuk bahan baku dan kemasan kata pemilik didapatkan dari pihak ketiga yang berasal dari kota Pare-Pare. Saat ini barang bukti kosmetik dan sabun diamankan dulu, sementara pelaku tentu akan diproses”.

Kasus kedua, pada tanggal 21 September 2015, petugas BPOM dibantu oleh aparat kepolisian dari Polda Sulselbar menemukan ribuan kosmetik berbahaya di jalan Teuku Umar 10, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulsel. Kosmetik ini ditemukan di dua tempat berbeda termasuk sebuah rumah yang dijadikan gudang kosmetik. Ribuan kosmetik ilegal ini terpaksa disita karena tidak memiliki surat izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

Kasus ketiga yang menyita perhatian terjadi pada tanggal 29 Oktober 2015 Makassar. Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari Badan POM Pusat, Balai Besar POM Makassar dan Polda Sulsel dari Subdit I Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggerebek rumah Ed (27) di kompleks perumahan Griya Harapan Andi Tonro. Hasilnya ditemukan ribuan paket kosmetik ilegal, baik dalam bentuk kemasan dus maupun

botolan. Totalnya ada sekitar 50 (lima puluh) item senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta). Rumah di Jalan Andi Tonro IV, blok G No. 9, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Dari penelusuran penulis, penyebab maraknya peredaran kosmetik palsu ini beragam. Pertama sebagai faktor utama adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal. Faktor lain adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota Makassar, khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, sebagian barang palsu yang beredar juga diproduksi di luar kota Makassar. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah. Selain itu, faktor selanjutnya adalah bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang gampang untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu.

C. Upaya Penanggulangan Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar

Dalam upaya penanggulangan secara umum sebenarnya sudah ada Renstra BPOM di Makassar Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan

pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan BBPOM di Makassar, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen pimpinan dan staf BBPOM di Makassar. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BPOM di Makassar, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Renstra BPOM Tahun 2015-2019 menjadi acuan kerja bagi BBPOM di Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan BBPOM di Makassar dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja balai dan kinerja pegawai.

Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Kepala Seksi penyitaan BBPOM Makassar, Dra. Madania Waris, Apt., dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan terhadap korban perdagangan kosmetik palsu di kota Makassar ialah BBPOM telah melakukan perencanaan dalam setiap tahunnya untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan ke daerah-daerah, toko-toko, dan tempat peredaran kosmetik lainnya di kota Makassar. Ini sudah merupakan visi misi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu sendiri untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap produk-produk obat dan makanan. Dengan tetap mengedepankan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. (Nurul Atfiah Natsir, 2015).

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam upaya pre-emptif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku. Penanggulangan perdagangan kosmetik palsu di kota Makassar, apabila dikaji secara kriminologis, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu salah satunya adalah upaya pre-emptif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emptif adalah suatu

tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan.

Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini memungkinkan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Dalam upaya pre-emptif, yang dicegah adalah niat dari si pelaku. Tindakan pre-emptif ini, selain dilakukan oleh bidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM sendiri, juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan lembaga-lembaga yang membidangi masalah kosmetik di Kota Makassar. Upaya yang telah dilakukan oleh BPOM sejauh ini adalah melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, toko-toko kecil dan toko besar (supermarket).

Dalam upaya Pre-emptif diperlukan perencanaan strategi oleh BPOM yang merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang memiliki risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

b. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen kosmetik palsu di Kota Makassar, selain dari upaya pre-emptif, perlunya juga kesadaran konsumen untuk membedakan antara kosmetik asli dengan palsu, karena jika penggunaan konsumen kosmetik palsu meningkat maka penjualan kosmetik palsu pun tak henti-hentinya beredar dengan cara apapun, baik melalui media sosial maupun di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak gampang dijangkau oleh aparat pemberantas kosmetik palsu, meskipun sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat yang berwenang.

c. Upaya represif

Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman maupun pembinaan-pembinaan.

Upaya represif ini ditempuh dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pemalsuan kosmetik. Setiap hal yang

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan), kosmetik tidak dijelaskan secara rinci. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Artinya disini bahwa kosmetik dalam undang-undang kesehatan masuk dalam golongan sediaan farmasi. Meskipun perangkat undang-undang kesehatan yang mengatur tentang kosmetik telah ada, sampai saat ini masih ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kosmetika di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Makassar, menyebabkan perlunya peran aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut.

Menurut analisis Penulis bahwa perdagangan kosmetik yang tidak didaftarkan di BPOM namun beredar dan dijual di masyarakat telah melanggar peraturan hukum yang ada. Pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf c, yakni; "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa”, Pasal 7 huruf a, yakni; “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha” dan d, yakni; “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni; “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 196 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan Pasal 197 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah)”. Orang yang didapatkan melanggar peraturan tersebut harus dijera secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang penulis peroleh, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab peredaran kosmetik palsu ini beragam :
 - a. Pertama, sebagai faktor utama adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal.
 - b. Faktor lain adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota Makassar, khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara. Sebagian barang palsu yang beredar juga diproduksi di luar kota Makassar.
 - c. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah.
 - d. Selain itu, faktor selanjutnya adalah bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang gampang untuk didapatkan di

pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu.

2. Upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dapat di tempuh dengan langkah di bawah ini :

- a. Upaya pre-emptif dengan mengacu kepada Renstra BPOM di Makassar Tahun 2015-2019 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM untuk 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Upaya preventif dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen untuk membedakan dan mengetahui dampak dari penggunaan kosmetik palsu.
- c. Upaya represif dengan menjerat para pelaku pemalsuan kosmetik sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 4 huruf c, yakni; “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, Pasal 7 huruf a, yakni; “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha” dan d, yakni; “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni; “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan Pasal 197 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah)”.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait dengan peredaran kosmetik palsu berdasarkan hasil kajian di atas adalah :

1. Diharapkan agar semua *stake holder* agar lebih antisipatif dalam melakukan sosialisasi terkait dengan peredaran dan bahaya penggunaan kosmetik palsu.
2. Dalam upaya penanggulangan diharapkan agar pihak BPOM dan kepolisian baik, Polrestabes Kota Makassar atau Polda Sulselbar

agar lebih meningkatkan kerjasama dalam upaya operasi penanggulangan peredaran kosmetik palsu, mulai dari pengawasan barang palsu yang masuk sampai penyalahgunaan barang industri yang diracik menjadi kosmetik palsu.

3. Supaya pelaku pemalsuan kosmetik dihukum dengan pidana maksimal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dengan maksud pemberian efek jera agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika : Jakarta
- A.S.Alam.2010. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. Jakarta : Kompas.
- Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Insan Budi Maulana., 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Transmedia Pustaka: Jakarta Selatan.
- Harsono Adisumarto. 1990. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara.
- R.Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia : Bogor.
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soedjono Dirjodosisworo. 2000. *Hukum perusahaan mengenai hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak paten, hak merek*. Bandung: Mandar Maju.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Citra Adhitya Bhakti, Jakarta.

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro. 1982. *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali : Jakarta.

Wiratmo Dianggoro. 1997. "*Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis*". Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol2, 1997.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Website :

- <http://www.solopos.com/2015/02/25/hasil-survei-miap-peredaran-produk-palsu-berpotensi-rugikan-negara-rp651-triliun-580110>
- <http://ipnews.acaciapat.com/>
- <https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>